

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator yang ada di dalam SDGs setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan pencapaian masing-masing indikator. Secara keseluruhan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 5 klaster dimana pada tahun 2018 klaster 2 sebagai klaster yang sangat bagus diperoleh oleh Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, kemudian klaster 1 dengan kategori yang buruk diperoleh Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2020 klaster 3 sebagai klaster sangat bagus diperoleh Kota Magelang, Kota Salatiga Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo, kemudian klaster 5 sebagai klaster yang buruk diperoleh Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemasang.
2. Implementasi dari penerapan SDGs di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami dinamika atau perkembangan yang beragam di tahun 2018 dan 2020. Hal ini ditandai dengan beberapa wilayah yang diukur melalui indikator SDGs mengalami perubahan dan berkurangnya wilayah yang dikategorikan klaster yang buruk. Pada tahun 2018 klaster 1 sebagai

klaster buruk (bawah) dengan jumlah anggota klaster 5 kabupaten/kota, kemudian klaster 2 sebagai klaster sangat bagus (atas) dengan jumlah anggota klaster 8 kabupaten/kota, selanjutnya klaster 3 sebagai klaster yang baik dengan jumlah anggota klaster 1 kabupaten/kota, klaster 4 sebagai klaster menengah dengan anggota klaster 2 kabupaten/kota, dan klaster 5 sebagai klaster kurang baik dengan jumlah anggota klaster 19 kabupaten/kota. Sedangkan tahun 2020, klaster 1 sebagai klaster menengah dengan jumlah anggota klaster 18 kabupaten/kota, klaster 2 sebagai klaster baik dengan jumlah anggota klaster 1 kabupaten/kota, klaster 3 sebagai klaster sangat bagus (atas) dengan jumlah anggota klaster 4 kabupaten/kota, klaster 4 sebagai daerah kurang baik dengan jumlah anggota klaster 9 kabupaten/kota, dan klaster 5 sebagai daerah yang buruk (bawah) dengan jumlah anggota klaster 3 kabupaten/kota.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan, implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemetaan yang didapatkan, pemerintah seyogyanya memprioritaskan kebijakan sesuai dengan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dengan mempertimbangkan karakter (variabel) yang ada di dalam indikator SDGs.
2. Kinerja SDGs mengalami perkembangan dari tahun 2018 sampai 2020 mengindikasikan bahwa implementasi SDGs di Jawa Tengah sudah dilakukan secara serius oleh pemerintah. Akan tetapi, optimalisasi masih perlu dilakukan terutama pada indikator SDGs 1 : Tanpa Kemiskinan hal ini

sesuai dengan isi RPJPN 2005-2025, yang mana masalah kemiskinan bukan hanya perihal besar dan kecilnya pendapatan, melainkan perlu adanya fokus pada kerentanan dan kerawanan orang atau penduduk menjadi miskin dan perihal ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada atau tidaknya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari dan pada SDGs 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Sekretariat Nasional SDGs, pada indikator ini masih ditemukan masalah khususnya pada kurangnya peluang kerja yang layak secara berkala, investasi yang tidak cukup memadai dan rendahnya konsumsi yang menjadi landasan masyarakat demokratis.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Pada penelitian ini yang awalnya menggunakan 17 indikator SDGs, akan tetapi indikator yang digunakan hanya sebanyak 13 indikator tahun 2018 dan 2020 dimana ke-empat indikator yang tidak digunakan seperti indikator ke-12 : konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, indikator ke-14 : ekosistem lautan, indikator ke-15 : ekosistem daratan, dan indikator ke-17 : kemitraan untuk mencapai tujuan tidak tersedia data dengan skala kabupaten/kota.
2. Beberapa data yang digunakan pada penelitian ini tidak sepenuhnya sesuai dengan data pengukuran indikator SDGs, sehingga penelitian ini menggunakan data pengganti sebagai proksi bagi data yang tidak tersedia tersebut.

3. Pada penelitian ini hanya mengelompokkan kesamaan karakteristik setiap kabupaten/kota berdasarkan variabel yang ada pada indikator SDGs secara visual tanpa mempertimbangkan pengaruh kedekatan wilayah secara statistik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya menganalisis hubungan kausalitas dengan pendekatan spasial antar wilayah kabupaten/kota.

